

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dilihat dari Target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan I di Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2016-2020 memiliki persenan yang naik turun setiap tahunnya, dimana tahun 2016-2019 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terus meningkat melebihi target, sedangkan tahun 2020 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target. Hal tersebut, dapat berubah tergantung hasil realisasi pajak kendaraan bermotor dari target yang telah ditetapkan.
2. Beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Prilaku wajib pajak, Pemahaman tentang pajak kendaraan bermotor masih rendah, adanya covid-19, tingkat penghasilan atau faktor ekonomi, kendaraan berada di daerah yang jarang melintas di jalan kota (jalan protokol), membeli kendaraan dengan plat luar daerah, status kendaraan yang masih kredit dan kendaraan hilang atau dicuri.

6.2 Saran

1. Sebaiknya Badan Pendapatan I di Badan Pendapatan dan aset Daerah\ Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih sigap dan tegas dalam merealisasikan penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga dapat mencapai target, dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban membayar pajaknya.
2. Disarankan kepada Bidang Layanan dan Keberatan di Pendapatan I pada Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk lebih tegas dalam menindak lanjuti wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan cara memberikan sanksi berupa denda atau menilang kendaraan yang pajaknya tertunggak agar penerimaan pajak kendaraan bermotor per tahunnya tetap maksimal dan terus meningkatkan penerimaan pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Deden Edward Yokeu Bernadin (2017) *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Wilayah Kota Bandung*

Kurniati (2019) *Implentasi Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016*

Ulfah Kartini (2018) *Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2016*

Rizki Adrian (2016) *Analisis Penerapan Tax Amnesty Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak*

Buku :

Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat

Aloysius, Djedoma, *Modul Akuntansi Perpajakan*, Kupang

Darise N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : PT Indeks

Kurniawan, Purwanto. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi di Indonesia*. Malang : Banyu Media Publising

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor BPAD. P1. 2/ 000. 005/ 1103/ 2019 Tentang *Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019*

Mardismo, 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta : Andi Offset

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 Tentang *Pajak Daerah*.

Sugiyono. 2010. *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta